



Nama Formulir:

**Lembar
Pengesahan
Karya Ilmiah**

No. FR-003/PR-003/KB-02-01/MMP/UPM/2020

Issue/Revisi

1

Tgl Berlaku

15 Juli 2020

Halaman

1

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap Dr. Mohammad Subhi, M.Hum.

Jabatan Ketua Program Studi

Program Studi Magister Ilmu Agama Islam

NIP 208120153

Telah melakukan penelaahan karya ilmiah berjudul:

MAKALAH SEJARAH SOSIAL ISLAM DI INDONESIA (ORDE LAMA, BARU DAN REFORMASI)

Dan menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut sudah memenuhi kaidah penulisan ilmiah dan oleh karenanya layak diajukan untuk keperluan unggah karya ilmiah di Universitas Paramadina, atas nama:

Nama Lengkap Syahrizal

Jenjang S1 / S2 *

Program Studi Magister Ilmu Agama Islam

NIM 223241020

Demikian hasil penelaahan atas karya ilmiah ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Jakarta, 17 Maret 2026

Pencelaah,

NIP: 208120153

Dr. Mohammad Subhi, M.Hum.

Nama Formulir:

No.

FR-002/PR-003/KB-02-
01/MMP/UPM/2020

**Surat Pernyataan
dan Validasi**

Issue/Revisi

1

Tgl Berlaku

15 Juli 2020

Halaman

1

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap

SyaHRiza

Jenjang

~~S1~~ / (S2)

Program Studi

MAI

NIM

223241020

Alamat

Jl. Kayutamis VI RT 011 RW 05
No. 16 Jak-Tim

* coret yang tidak perlu

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang saya ajukan yaitu:

Makalah Sejarah Sosial Islam di Indonesia
(Orde Lama, Baru dan Reformasi)

adalah hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat pelanggaran kaidah-kaidah akademik pada karya ilmiah saya, maka saya bersedia menanggung sanksi-sanksi yang dijatuhkan karena kesalahan tersebut, sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Jakarta, 31 Maret 2020

Yang membuat Pernyataan,



Nama Lengkap:

SyaHRiza

NIM:

223241020



MAKALAH SEJARAH SOSIAL ISLAM DI INDONESIA
(ORDE LAMA, BARU DAN REFORMASI)

Oleh:

SYAHRIZAL - 223241020

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan.....	3
BAB II.....	4
PEMBAHASAN	4
A. Sejarah Sosial Islam di Indonesia setelah Kemerdekaan.....	4
1. Orde Lama (1945-1966).....	4
a. Latar Belakang Politik dan Sosial	4
b. Peran Organisasi Islam.....	5
c. Kontradiksi Ideologi dan Kebijakan	7
d. Hubungan dengan Masyarakat.....	8
2. Orde Baru (1966-1998).....	10
a. Kebijakan Pemerintah dan Reaksi Organisasi Islam	10
b. Perkembangan Sosial dan Ekonomi.....	10

c.	Hubungan dengan Masyarakat.....	11
d.	Kontradiksi Ideologi dan Kebijakan	11
3.	Reformasi (1998-sekarang).....	12
a.	Kebangkitan Partisipasi Politik.....	12
b.	Perkembangan Sosial dan Ekonomi.....	13
c.	Hubungan dengan Masyarakat.....	13
d.	Kontradiksi Ideologi dan Kebijakan	14
B.	Dinamika Sosial dan Kultural Islam di Indonesia	14
1.	Hubungan antara masyarakat Islam dengan masyarakat non-Islam	14
2.	Perkembangan budaya dan pendidikan Islam.	15
3.	Pengaruh globalisasi terhadap praktik keagamaan.	16
BAB III	17
PENUTUP	17
A.	Kesimpulan.....	17
B.	Saran	17
DAFTAR PUSTAKA	19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah sosial Islam di Indonesia adalah cermin dari perjalanan panjang bangsa ini dalam menghadapi tantangan politik, sosial, dan budaya, terutama setelah meraih kemerdekaan pada tahun 1945¹. Indonesia, dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki tradisi keagamaan yang kaya dan beragam, menjadikannya sebagai salah satu pusat peradaban Islam. Dengan keberagaman suku, budaya, dan agama yang ada, Islam di Indonesia telah mengalami proses akulturasi yang unik, membentuk identitas sosial yang khas dan beragam. Setelah kemerdekaan, dinamika sosial dan politik Islam di Indonesia mengalami transformasi signifikan melalui tiga periode besar: Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Masing-masing periode ini membawa tantangan dan peluang yang berbeda bagi komunitas Muslim dan perkembangan Islam di tanah air.

Pada periode Orde Lama (1945-1966), di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, Islam berusaha diintegrasikan ke dalam politik nasional. Meskipun Soekarno mengedepankan ideologi Pancasila sebagai dasar negara, ia juga memberikan ruang bagi peran Islam dalam politik. Pada masa ini, berbagai organisasi Islam, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, memainkan peran penting dalam pengembangan masyarakat. Namun, tantangan besar muncul ketika ada gesekan antara ideologi sekuler dan aspirasi keagamaan, yang kadang-kadang menyebabkan ketegangan antara kelompok Islam dan non-Islam.

Masuk ke periode Orde Baru (1966-1998), di bawah rezim Soeharto, pendekatan pemerintah terhadap Islam berubah drastis. Soeharto berusaha mengendalikan kekuatan politik Islam dengan menerapkan kebijakan yang lebih represif terhadap organisasi-organisasi Islam. Meskipun banyak dari organisasi tersebut mengalami penekanan, mereka tetap menjadi kekuatan yang signifikan dalam masyarakat. Dalam periode ini, pemerintah berusaha mengarahkan pemikiran dan aktivitas umat Islam untuk mendukung agenda pembangunan nasional, namun tanpa menghilangkan identitas keagamaan mereka. Akibatnya, banyak elemen dalam masyarakat

¹ Aisyah Khoirunni'mah, "Sejarah Dan Peran Muhammadiyah Untuk Kemajuan Indonesia," *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2, no. 4 (2024): 124–34, <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i4.442>.

Islam yang merasa terpinggirkan dan mulai mempertanyakan posisi mereka dalam tatanan sosial-politik.

Dengan runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia memasuki era Reformasi, yang membawa harapan baru bagi kebangkitan demokrasi dan pluralisme. Dalam konteks ini, organisasi-organisasi Islam dan tokoh-tokoh Muslim kembali terlibat secara aktif dalam politik dan masyarakat sipil. Kebebasan berpendapat yang baru ditemukan memungkinkan mereka untuk menyuarakan aspirasi dan kebutuhan komunitas mereka secara lebih terbuka. Namun, dengan kebangkitan kebebasan ini juga muncul tantangan baru, seperti meningkatnya ekstremisme dan radikalisme dalam beberapa kelompok Islam.

Memahami sejarah sosial Islam di Indonesia setelah kemerdekaan sangat penting untuk mengeksplorasi hubungan antara agama, politik, dan masyarakat. Transformasi yang terjadi dalam tiga periode tersebut tidak hanya berdampak pada perkembangan organisasi Islam, tetapi juga pada identitas sosial, budaya, dan politik umat Islam di Indonesia. Makalah ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dinamika sosial Islam di Indonesia, serta tantangan dan peluang yang dihadapi komunitas Muslim dalam setiap periode tersebut. Dengan memahami sejarah ini, diharapkan pembaca dapat menggali lebih dalam tentang bagaimana konteks sosial dan politik yang berbeda memengaruhi posisi dan peran Islam dalam masyarakat Indonesia. Penelitian ini juga berusaha mengidentifikasi pelajaran yang dapat diambil dari pengalaman sejarah untuk membantu membangun dialog yang lebih konstruktif dan harmonis antara umat Islam dan masyarakat lainnya di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Makalah ini bertujuan untuk mengkaji sejarah sosial Islam di Indonesia setelah kemerdekaan, dengan fokus pada tiga periode penting: Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, berikut adalah beberapa rumusan masalah yang akan dijawab:

1. Bagaimana konteks politik dan sosial Islam di Indonesia pada periode Orde Lama (1945-1966)?
2. Apa dampak kebijakan pemerintah terhadap organisasi dan masyarakat Islam selama Orde Baru (1966-1998)?
3. Apa yang menjadi ciri khas dan tantangan yang dihadapi komunitas Islam di era Reformasi (1998-sekarang)?

4. Bagaimana interaksi antara umat Islam dengan masyarakat non-Islam dalam setiap periode tersebut?
5. Apa pelajaran yang dapat diambil dari sejarah sosial Islam di Indonesia untuk masa depan?

Rumusan masalah ini akan menjadi panduan dalam pembahasan makalah, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika sosial dan politik Islam di Indonesia setelah kemerdekaan. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, diharapkan makalah ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian sejarah sosial Islam di Indonesia.

C. Tujuan

Makalah ini memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai terkait dengan kajian sejarah sosial Islam di Indonesia setelah kemerdekaan. Adapun tujuan tersebut antara lain:

1. Menggambarkan konteks sejarah sosial Islam di Indonesia
2. Menganalisis peran organisasi Islam dalam politik
3. Mengidentifikasi dampak kebijakan pemerintah
4. Meneliti dinamika hubungan antarumat beragama
5. Menggali isu-isu kontemporer yang dihadapi umat Islam
6. Memberikan pelajaran untuk masa depan

Dengan mencapai tujuan-tujuan tersebut, makalah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman yang lebih baik tentang sejarah sosial Islam di Indonesia dan peran pentingnya dalam membentuk identitas dan dinamika masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Sejarah Sosial Islam di Indonesia setelah Kemerdekaan

1. Orde Lama (1945-1966)

Periode Orde Lama dimulai setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 dan berlangsung hingga jatuhnya Presiden Soekarno pada tahun 1966. Dalam rentang waktu ini, terjadi dinamika politik dan sosial yang kompleks, di mana Islam memainkan peran yang signifikan dalam membentuk identitas bangsa dan pengaturan negara.

a. Latar Belakang Politik dan Sosial

Setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, negara ini menghadapi tantangan besar dalam merumuskan identitas dan arah politiknya. Keberhasilan dalam memperjuangkan kemerdekaan tidak diikuti dengan stabilitas politik dan sosial yang segera terwujud. Segera setelah proklamasi, Indonesia dihadapkan pada agresi militer Belanda yang berupaya untuk mengembalikan kekuasaan kolonial, menciptakan kebutuhan mendesak untuk mempertahankan kemerdekaan dan membangun pemerintahan yang kuat. Dalam situasi yang tidak menentu ini, berbagai kelompok politik mulai muncul, masing-masing dengan visi dan agenda mereka sendiri. Soekarno, sebagai proklamator dan pemimpin pertama, berupaya mengintegrasikan berbagai kepentingan politik dalam satu kesatuan, dengan mengusulkan ideologi Pancasila sebagai dasar negara yang diharapkan dapat menjadi jembatan antara berbagai kelompok etnis dan agama di Indonesia². Namun, meskipun Pancasila menawarkan ruang untuk semua, ketegangan antara kelompok sekuler dan Islam tetap ada, menciptakan konflik yang kompleks dalam arena politik.

Munculnya berbagai ideologi politik, termasuk nasionalisme, komunisme, dan Islamisme, semakin memperumit situasi. Kelompok-kelompok Islam, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, merasa perlu untuk berperan aktif dalam politik demi memperjuangkan kepentingan umat. NU, dengan pendekatan tradisionalisnya, berupaya melestarikan budaya Islam dan nilai-nilai lokal, sementara Muhammadiyah, dengan

² N Hidayah and R. Winarni, "Pengaruh Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Kehidupan Etnis Tionghoa Di Bidang Politik, Sosial," *Publika Budaya* 2, no. 2 (2014): 19–31.

pendekatan modernis, menekankan reformasi pendidikan dan sosial³. Ketegangan ideologis ini memunculkan pertentangan yang tidak hanya berdampak pada politik tetapi juga pada interaksi sosial antara umat Islam dan kelompok non-Islam, di mana dalam beberapa kasus, perbedaan pandangan ini berujung pada konflik terbuka, seperti yang terjadi pada peristiwa-peristiwa yang melibatkan kekerasan antar kelompok di beberapa daerah.

Dalam konteks sosial, kehidupan masyarakat di Indonesia pasca-kemerdekaan sangat beragam, dengan berbagai latar belakang etnis dan budaya yang menciptakan kekayaan sosial luar biasa, tetapi juga tantangan dalam membangun kohesi sosial. Umat Islam, sebagai mayoritas, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada saat yang sama, isu-isu seperti kemiskinan, pendidikan, dan ketidakadilan sosial mulai menjadi perhatian utama. Dalam hal ini, organisasi-organisasi Islam mulai terlibat dalam aktivitas sosial, mendirikan sekolah-sekolah, lembaga kesehatan, dan program-program pemberdayaan masyarakat untuk membantu mengatasi masalah tersebut.

Hubungan antara Islam dan negara juga menjadi sorotan utama dalam upaya membangun negara. Meskipun Soekarno memberikan pengakuan terhadap peran Islam, beberapa kalangan merasa bahwa aspirasi mereka tidak sepenuhnya diakomodasi dalam kebijakan publik. Ketidakpuasan ini menjadi salah satu faktor yang memicu munculnya gerakan-gerakan Islam yang lebih radikal, menuntut penerapan syariat Islam secara lebih nyata dalam pemerintahan. Secara keseluruhan, latar belakang politik dan sosial pada periode Orde Lama menciptakan panggung bagi dinamika yang kompleks antara agama, politik, dan masyarakat, yang penting untuk memahami peran umat Islam dalam proses pembangunan bangsa dan tantangan yang dihadapi selama periode tersebut. Latar belakang ini juga menjadi landasan bagi analisis lebih lanjut mengenai perkembangan sosial Islam di Indonesia dan bagaimana hal itu membentuk identitas nasional di masa mendatang.

b. Peran Organisasi Islam

Selama periode Orde Lama (1945-1966), organisasi-organisasi Islam di Indonesia memainkan peran yang sangat signifikan dalam membentuk dinamika politik dan sosial negara. Dua organisasi utama yang mendominasi arena ini adalah Nahdlatul Ulama (NU)

³ Alhilal Yusril Hawari, Utang Suwaryo, and Dede Sri Kartini, "Perbandingan Peran Nahdlatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyah Dalam Politik Di Indonesia," *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)* 5, no. 1 (2023): 41–53, <https://doi.org/10.18196/jpk.v5i1.19187>.

dan Muhammadiyah, masing-masing dengan pendekatan dan visi yang berbeda dalam memperjuangkan kepentingan umat Islam dan pengaruh mereka dalam tatanan politik. Nahdlatul Ulama (NU), yang didirikan pada tahun 1926, berfokus pada pendekatan tradisional dan mempertahankan nilai-nilai budaya serta praktik Islam yang sudah ada. NU menekankan pentingnya pengajaran agama dan pelestarian tradisi Islam, sehingga menjadi tempat bagi banyak umat Muslim yang menginginkan keterikatan pada ajaran agama secara konvensional. Dalam konteks politik, NU aktif berpartisipasi dalam Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) yang didirikan pada tahun 1945, yang menjadi wadah bagi organisasi-organisasi Islam untuk memperjuangkan kepentingan politik mereka⁴. Keberadaan NU di Masyumi memberikan suara yang kuat bagi umat Islam dalam pemerintahan, meskipun dalam praktiknya, mereka sering menghadapi tantangan dari kelompok-kelompok lain yang memiliki pandangan berbeda.

Di sisi lain, Muhammadiyah, yang didirikan pada tahun 1912, mengusung pendekatan modernis dan fokus pada reformasi sosial serta pendidikan⁵. Organisasi ini mendorong penerapan prinsip-prinsip Islam yang lebih rasional dan progresif, serta memprioritaskan pendidikan sebagai alat untuk memberdayakan umat. Pada masa Orde Lama, Muhammadiyah aktif mendirikan sekolah-sekolah, rumah sakit, dan lembaga sosial lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam politik, meskipun tidak secara langsung terlibat dalam partai politik, Muhammadiyah berusaha untuk mempengaruhi kebijakan publik dengan pendekatan advokasi yang menekankan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua organisasi ini tidak hanya terlibat dalam bidang politik, tetapi juga berperan aktif dalam merespons isu-isu sosial yang dihadapi masyarakat. NU dan Muhammadiyah seringkali bekerja sama dalam kegiatan sosial, pendidikan, dan kesehatan, meskipun mereka memiliki perbedaan dalam pandangan teologis dan metodologi. Kerja sama ini mencerminkan semangat persatuan di antara umat Islam di Indonesia untuk menghadapi tantangan bersama.

Namun, dengan meningkatnya ketegangan politik dan ideologis pada akhir 1950-an, peran organisasi-organisasi Islam menjadi semakin kompleks⁶. Mereka dihadapkan pada pilihan sulit untuk tetap mempertahankan identitas mereka sebagai organisasi Islam

⁴ Jamaluddin Jamaluddin, Misbahuddin Misbahuddin, and Kurniati Kurniati, "Peran Organisasi Islam Di Indonesia Dalam Pengembangan Dan Penegakan Hukum Islam," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 2 (2022): 130–43, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i2.567>.

⁵ Septyana Tentiasih, "Peran Muhammadiyah Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Islam Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kramat Jati* 3, no. 2 (2023): 60–69.

⁶ Rizqi Irza Afifi and Sofyan Kristianwantoni, "Gerwani In The Communist Ideology of 1950-1965," *Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan, Dan Humaniora)* 3, no. 1 (2019): 10–20, <https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet/article/view/690>.

sambil berusaha beradaptasi dengan dinamika politik yang berubah. Pada masa ini, konflik antara ideologi Islam dan sekuler semakin tajam, dan beberapa elemen dalam organisasi Islam merasa perlu untuk mengambil posisi yang lebih radikal dalam menuntut penerapan syariat Islam.

Secara keseluruhan, peran organisasi Islam selama Orde Lama sangat penting dalam pembentukan identitas sosial dan politik umat Islam di Indonesia. Mereka menjadi jembatan antara nilai-nilai agama dan kehidupan berbangsa, serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya memperjuangkan keadilan sosial, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangan dan ketegangan yang muncul selama periode ini juga menciptakan fondasi bagi perubahan yang akan terjadi di masa depan, ketika umat Islam akan semakin terlibat dalam dinamika politik dan sosial di Indonesia.

c. Kontradiksi Ideologi dan Kebijakan

Periode Orde Lama (1945-1966) ditandai oleh kontradiksi ideologi dan kebijakan yang kompleks dalam pengelolaan negara, terutama dalam hubungan antara agama dan politik. Meskipun Soekarno, sebagai Presiden pertama Republik Indonesia, berusaha untuk menjalin kesatuan nasional dengan memperkenalkan Pancasila sebagai dasar negara, banyak pihak, terutama dari kalangan Islam, merasa bahwa Pancasila tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi mereka. Ketidakpuasan ini muncul karena banyak kelompok Islam menginginkan adanya pengakuan lebih terhadap syariat Islam dalam konstitusi dan kebijakan pemerintah.

Sementara Pancasila dirumuskan untuk mengakomodasi berbagai kepentingan, implementasinya sering kali menimbulkan konflik⁷. Soekarno berusaha menciptakan Demokrasi Terpimpin, yang memberikan kontrol lebih besar kepada pemerintah pusat, dan dalam banyak hal, membatasi partisipasi politik. Meskipun ini ditujukan untuk menciptakan stabilitas, banyak organisasi Islam merasa terpinggirkan. Keterlibatan mereka dalam Masyumi, sebagai wadah politik, tidak menjamin bahwa aspirasi politik mereka akan terakomodasi secara adil dalam kebijakan publik. Hal ini menimbulkan kekecewaan di kalangan umat Islam yang berharap untuk melihat lebih banyak nilai-nilai Islam diterapkan dalam pemerintahan.

Selain itu, kebijakan pemerintahan yang cenderung pro-sekuler dan anti-komunis sering kali mengabaikan aspirasi umat Islam. Pada akhir 1950-an, pemerintah berusaha

⁷ Muhammad Safar and Ismaidar, "Sejarah Perkembangan Politik Hukum Nasional," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3 (2023): 9078–88.

menekan pengaruh komunisme dengan mengandalkan dukungan dari organisasi-organisasi Islam. Namun, pendekatan ini seringkali tidak konsisten dan berpotensi menciptakan friksi di antara berbagai kelompok. Hal ini memicu ketidakpuasan di kalangan umat Islam yang merasa bahwa mereka hanya dimanfaatkan sebagai alat politik tanpa mendapatkan kejelasan mengenai peran mereka dalam tatanan politik yang lebih besar.

Ketidakpuasan ini semakin memuncak ketika kelompok-kelompok Islam radikal mulai muncul, menuntut penerapan syariat Islam yang lebih tegas. Konflik yang terjadi antara kelompok sekuler dan Islam di beberapa daerah menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia berada dalam ketegangan ideologis yang mendalam. Pada saat yang sama, pemerintah berusaha menjalin aliansi dengan berbagai kelompok untuk mempertahankan kekuasaan, yang justru memperburuk polaritas ideologi dalam masyarakat. Dengan munculnya ketegangan antara berbagai ideologi, termasuk nasionalisme, komunisme, dan Islamisme, Soekarno harus menavigasi tantangan besar dalam menjaga stabilitas politik. Kebijakan yang diambil sering kali bersifat reaktif dan tidak selalu mencerminkan konsensus yang lebih luas, menyebabkan banyak kalangan merasa tidak terwakili. Ketidakpastian ini memicu keresahan di kalangan umat Islam dan mendorong mereka untuk mencari cara alternatif dalam memperjuangkan aspirasi politik dan sosial mereka.

Secara keseluruhan, kontradiksi antara ideologi dan kebijakan pada masa Orde Lama menciptakan ketegangan yang mendalam dalam masyarakat. Kekecewaan yang dirasakan oleh banyak organisasi Islam terhadap kebijakan pemerintah mendorong mereka untuk berusaha mencari solusi yang lebih komprehensif bagi kebutuhan dan harapan umat. Periode ini menjadi momen penting dalam sejarah sosial Islam di Indonesia, di mana pergeseran ideologis mulai terlihat, yang nantinya akan memengaruhi dinamika politik dan sosial dalam periode selanjutnya.

d. Hubungan dengan Masyarakat

Pada periode Orde Lama (1945-1966), hubungan antara organisasi Islam dan masyarakat Indonesia sangat beragam dan dipengaruhi oleh konteks politik, sosial, dan budaya yang dinamis⁸. Organisasi-organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah berperan penting dalam membentuk interaksi sosial antara umat Islam dan masyarakat secara keseluruhan. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai wadah bagi

⁸ Yayan Sahi et al., "PERGULATAN DOKTRIN POLITIK NAHDLATUL ULAMA: (Refleksi Masa Kolonial Belanda, Jepang, Era Kemerdekaan, Orde Baru Hingga Pasca Reformasi Di Indonesia)," *Jp: Jurnal Polahi* 1, no. 1 (2023): 1–16.

aspirasi politik, tetapi juga sebagai penggerak perubahan sosial dan pendidikan di masyarakat. NU, dengan pendekatan tradisionalnya, berfokus pada pelestarian budaya lokal dan praktik-praktik Islam yang telah ada. Melalui jaringan pesantren dan lembaga pendidikan yang didirikannya, NU memberikan kontribusi besar terhadap pendidikan dan pengembangan masyarakat. Mereka juga berperan dalam berbagai kegiatan sosial, seperti bantuan kemanusiaan dan pengembangan ekonomi masyarakat. Hubungan NU dengan masyarakat, khususnya di kalangan warga Nahdliyin, sangat erat, karena mereka saling mendukung dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi.

Di sisi lain, Muhammadiyah, dengan pendekatan modernisnya, menekankan pentingnya pendidikan formal dan reformasi sosial. Organisasi ini mendirikan sekolah-sekolah dan rumah sakit, serta melaksanakan berbagai program sosial untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Muhammadiyah juga berusaha menjalin hubungan baik dengan kelompok-kelompok non-Islam melalui program-program kemanusiaan dan pendidikan. Ini menciptakan ruang dialog antara umat Islam dan masyarakat non-Islam, serta memperkuat kohesi sosial di tengah keberagaman.

Namun, hubungan ini tidak selalu berjalan mulus. Dalam konteks politik yang semakin tegang, beberapa organisasi Islam mengalami tantangan dalam menjalin komunikasi dengan kelompok-kelompok lain. Munculnya perpecahan ideologis, terutama antara kalangan sekuler dan Islamis, sering kali menimbulkan ketegangan yang berdampak pada interaksi sosial. Dalam beberapa kasus, konflik horizontal terjadi di masyarakat, yang melibatkan kelompok-kelompok Islam dan non-Islam, menciptakan ketidakpastian dan kekhawatiran di kalangan masyarakat.

Keterlibatan organisasi Islam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat menunjukkan pentingnya peran mereka dalam pembangunan sosial. Namun, tantangan yang dihadapi dalam menjalin hubungan dengan masyarakat juga menggarisbawahi kompleksitas dinamika sosial yang ada. Ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah, bersama dengan pergeseran ideologis yang muncul, menimbulkan tantangan bagi organisasi-organisasi Islam untuk tetap relevan dan dapat berkontribusi dalam memecahkan masalah sosial yang dihadapi masyarakat.

Secara keseluruhan, hubungan antara organisasi Islam dan masyarakat pada masa Orde Lama menunjukkan adanya interaksi yang kompleks dan dinamis. Meskipun terdapat tantangan dan ketegangan, organisasi-organisasi Islam tetap menjadi aktor penting dalam upaya pembangunan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Periode ini

memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana organisasi-organisasi tersebut berupaya membangun jembatan antara nilai-nilai agama dan kebutuhan masyarakat, serta menciptakan landasan bagi interaksi sosial yang lebih konstruktif di masa mendatang.

2. Orde Baru (1966-1998)

Orde Baru, yang dimulai setelah jatuhnya pemerintahan Soekarno pada tahun 1966, ditandai oleh transisi besar dalam struktur politik, ekonomi, dan sosial Indonesia. Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, yang menjabat dari 1967 hingga 1998, pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan yang berorientasi pada stabilitas, pembangunan ekonomi, dan pengendalian sosial. Dalam konteks ini, hubungan antara negara dan organisasi-organisasi Islam mengalami perubahan signifikan.

a. Kebijakan Pemerintah dan Reaksi Organisasi Islam

Pemerintahan Orde Baru memperkenalkan kebijakan yang lebih represif terhadap partisipasi politik. Dalam konteks ini, organisasi-organisasi Islam, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, menghadapi tantangan dalam menavigasi hubungan mereka dengan pemerintah⁹. Awalnya, NU dan Muhammadiyah berusaha untuk beradaptasi dengan kebijakan pemerintah dengan berfokus pada kegiatan sosial dan pendidikan, sehingga memperkuat posisi mereka di masyarakat tanpa terlibat langsung dalam politik. Meskipun demikian, ada kesadaran di kalangan organisasi-organisasi ini bahwa pembatasan terhadap kebebasan berpolitik dapat mengancam keberlangsungan peran mereka.

Pemerintah Orde Baru cenderung menganggap organisasi-organisasi Islam sebagai alat untuk memperkuat legitimasi politik. Dengan demikian, mereka diperbolehkan untuk beroperasi dalam konteks sosial dan pendidikan, tetapi harus berkomitmen pada ideologi Pancasila dan tidak terlibat dalam politik praktis. Hal ini menciptakan ketegangan di dalam organisasi Islam, di mana sebagian anggota merasa bahwa pendekatan ini membatasi aspirasi mereka untuk berkontribusi secara aktif dalam kebijakan publik.

b. Perkembangan Sosial dan Ekonomi

Selama Orde Baru, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan, terutama pada tahun 1970-an hingga 1980-an. Namun, pertumbuhan ekonomi ini tidak

⁹ Eni Zulaiha, Kartini Fujiyanti Agustin, and Nida Al Rahman, "Pengaruh Sosial Politik Pada Metodologi Penafsiran Di Indonesia (Orde Lama, Orde Baru Dan Reformasi)," *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 5, no. 1 (2022): 25–34, <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v5i1.15538>.

selalu diiringi dengan pemerataan kesejahteraan sosial. Ketidakadilan sosial dan ketimpangan ekonomi menjadi isu yang semakin mencolok, memicu kritik dari berbagai kalangan, termasuk organisasi-organisasi Islam. Banyak anggota NU dan Muhammadiyah mulai menyuarkan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai mengabaikan kepentingan masyarakat, terutama di daerah-daerah pedesaan¹⁰.

Dalam respons terhadap situasi ini, organisasi-organisasi Islam mengembangkan program-program pemberdayaan masyarakat yang fokus pada pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Kegiatan sosial ini tidak hanya bertujuan untuk membantu masyarakat, tetapi juga untuk menjaga legitimasi dan relevansi organisasi di tengah tantangan yang dihadapi. Dengan cara ini, NU dan Muhammadiyah berupaya untuk tetap menjadi aktor kunci dalam pengembangan sosial, meskipun dalam batasan yang ditetapkan oleh pemerintah.

c. Hubungan dengan Masyarakat

Hubungan antara organisasi Islam dan masyarakat selama Orde Baru sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang menekankan stabilitas dan keamanan. Organisasi-organisasi Islam berusaha membangun jembatan antara nilai-nilai agama dan kebutuhan masyarakat, terutama dalam konteks pendidikan dan kesehatan. Namun, interaksi ini tidak selalu berjalan mulus, karena pemerintah seringkali mengintervensi kegiatan-kegiatan yang dianggap berpotensi mengganggu stabilitas politik¹¹.

Masyarakat, di sisi lain, tetap menghargai kontribusi organisasi-organisasi Islam dalam sektor sosial. NU dan Muhammadiyah diakui sebagai lembaga yang berperan dalam mendidik dan memberdayakan masyarakat. Namun, pada saat yang sama, ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah dan ketimpangan sosial mulai mendorong munculnya gerakan-gerakan yang lebih kritis, terutama di kalangan generasi muda.

d. Kontradiksi Ideologi dan Kebijakan

Selama Orde Baru, kontradiksi antara ideologi dan kebijakan pemerintah menjadi semakin jelas. Meskipun pemerintah Orde Baru berusaha untuk mengklaim identitas Pancasila sebagai ideologi yang inklusif, kebijakan-kebijakan yang represif dan cenderung sekuler menyebabkan ketidakpuasan di kalangan umat Islam. Beberapa

¹⁰ Afiani Arofatul Zidah, Krisna Ridha Pratama, and Yohanes Purwanto, "Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam Era Reformasi Di Indonesia," *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah* 9, no. 1 (2021): 97, <https://doi.org/10.24127/hj.v9i1.2528>.

¹¹ Saipul Rohman, Nurita Singalodra, and Dinar Ayudya Maharani, "Eksplorasi Sejarah Pemikiran Hukum : Integrasi Filsafat Hukum Dan Sosiologi Hukum Pada Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan" 6, no. 4 (2024): 11278–89.

kelompok Islam mulai merasa bahwa mereka tidak memiliki suara dalam pengambilan keputusan, yang memicu munculnya gerakan-gerakan yang lebih radikal dan menuntut adanya pengakuan lebih terhadap syariat Islam dalam kebijakan publik¹².

Secara keseluruhan, periode Orde Baru merupakan waktu yang penuh tantangan bagi organisasi-organisasi Islam di Indonesia. Meskipun mereka berhasil mengembangkan program-program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat, keterbatasan dalam partisipasi politik dan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah menciptakan ketegangan yang berpotensi memicu perubahan sosial di masa depan. Hubungan antara organisasi Islam dan masyarakat menjadi lebih kompleks, mencerminkan dinamika yang berubah seiring dengan perkembangan politik dan sosial yang berlangsung.

3. Reformasi (1998-sekarang)

Peristiwa Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 menandai titik balik penting dalam sejarah politik dan sosial Indonesia. Setelah lebih dari tiga dekade di bawah kekuasaan Orde Baru, masyarakat Indonesia, termasuk kelompok-kelompok Islam, bergerak untuk menuntut reformasi dalam berbagai aspek kehidupan. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi struktur politik, tetapi juga membawa dampak signifikan terhadap peran organisasi-organisasi Islam dalam masyarakat.

a. Kebangkitan Partisipasi Politik

Setelah runtuhnya pemerintahan Soeharto, ruang politik di Indonesia mulai terbuka lebar. Organisasi-organisasi Islam, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, kembali memainkan peran aktif dalam politik. Keduanya terlibat dalam proses demokratisasi, baik melalui partisipasi dalam pemilu maupun dalam membangun koalisi politik. NU, misalnya, berpartisipasi dalam mendirikan partai politik, seperti Partai Kebangkitan Nasional (PKB), yang mewakili kepentingan umat Islam dan berusaha untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kebijakan publik¹³.

Keterlibatan organisasi Islam dalam politik menunjukkan keinginan untuk menegaskan identitas mereka dalam konteks kebangsaan. Pada saat yang sama, ada kesadaran bahwa partisipasi politik harus diimbangi dengan komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan pluralisme. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi organisasi

¹² Hadi Prasetyo, "Strategi Kritik Cerpen 'Telinga' Terhadap Orba: Meninjau Struktur Produksi Dan Ideologi Teks," *Fon: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia* 17, no. 2 (2021): 122–34, <https://doi.org/10.25134/fon.v17i2.4329>.

¹³ Sofyan Sofyan, "Eksistensi Pendidikan Dan Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia Pra Dan Pasca Kemerdekaan," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 16, no. 1 (2022): 344, <https://doi.org/10.35931/aq.v16i1.856>.

Islam, di mana mereka harus menemukan cara untuk menyuarakan aspirasi umat tanpa mengorbankan nilai-nilai kebangsaan.

b. Perkembangan Sosial dan Ekonomi

Reformasi juga membawa perubahan besar dalam aspek sosial dan ekonomi. Masyarakat mulai aktif menuntut keadilan sosial dan perbaikan kondisi ekonomi, terutama di daerah-daerah yang selama ini terpinggirkan¹⁴. Organisasi-organisasi Islam, dengan jaringan yang luas di tingkat akar rumput, berperan dalam mengorganisir masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Program-program pemberdayaan yang dilakukan oleh NU dan Muhammadiyah semakin berkembang, dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.

Namun, meskipun ada kemajuan, tantangan tetap ada. Ketimpangan sosial masih menjadi isu yang signifikan, dan beberapa kalangan merasa bahwa program-program pemerintah tidak cukup menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, organisasi Islam menjadi mediator penting, menghubungkan masyarakat dengan pemerintah untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka.

c. Hubungan dengan Masyarakat

Setelah Reformasi, hubungan antara organisasi Islam dan masyarakat semakin diperkuat. Organisasi-organisasi ini menjadi aktor kunci dalam pembangunan sosial, memberikan dukungan kepada masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. NU dan Muhammadiyah memperluas jaringan pendidikan dan layanan kesehatan, serta aktif dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan¹⁵.

Kedua organisasi ini juga berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya toleransi dan pluralisme dalam konteks keberagaman Indonesia. Melalui program-program pendidikan dan dialog antaragama, mereka berusaha untuk membangun kesadaran akan pentingnya hidup berdampingan dalam masyarakat yang multikultural. Namun, hubungan ini tidak selalu harmonis. Dalam beberapa kasus, ketegangan muncul antara kelompok-kelompok Islam yang memiliki pandangan berbeda, terutama terkait isu-isu yang menyangkut penegakan syariat Islam. Beberapa kelompok lebih radikal mulai

¹⁴ Cahyo Pamungkas, Irin Oktafiani, and Leonardus Imbhiri, "Makna Pembangunan Bagi Orang Asli Papua: Studi Terhadap Marginalisasi Dan Depopulasi Di Tanah Papua," *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, no. 2019 (2022): 16–38, <https://doi.org/10.26593/jihi.v0i00.5970.16-38>.

¹⁵ Sahi et al., "PERGULATAN DOKTRIN POLITIK NAHDLATUL ULAMA: (Refleksi Masa Kolonial Belanda, Jepang, Era Kemerdekaan, Orde Baru Hingga Pasca Reformasi Di Indonesia)."

menuntut penerapan hukum Islam secara ketat, yang sering kali berseberangan dengan pandangan moderat yang dianut oleh mayoritas umat Islam.

d. Kontradiksi Ideologi dan Kebijakan

Pada masa Reformasi, kontradiksi antara ideologi dan kebijakan pemerintah kembali mencuat. Meskipun terdapat ruang lebih besar untuk partisipasi politik, banyak kelompok merasa bahwa kebijakan publik masih belum sepenuhnya mencerminkan aspirasi umat Islam. Isu-isu seperti pendidikan, ekonomi, dan keadilan sosial sering kali menjadi sorotan, dengan banyak kalangan menuntut agar nilai-nilai Islam dapat diterapkan dalam kebijakan publik. Di sisi lain, terdapat pula tekanan untuk menjaga pluralisme dan keberagaman dalam masyarakat. Tuntutan untuk menerapkan syariat Islam dalam ranah publik sering kali menimbulkan perdebatan yang sengit. Organisasi-organisasi Islam dihadapkan pada tantangan untuk merumuskan sikap yang seimbang antara aspirasi umat dan kebutuhan untuk menjaga harmoni dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, periode Reformasi merupakan waktu yang penuh dinamika bagi organisasi-organisasi Islam di Indonesia. Dengan terbukanya ruang politik, mereka kembali mengukuhkan peran mereka dalam masyarakat dan berkontribusi pada proses demokratisasi. Meskipun menghadapi berbagai tantangan dan kontradiksi, organisasi-organisasi Islam tetap berusaha untuk memperjuangkan aspirasi umat, membangun jembatan antara nilai-nilai agama dan kehidupan berbangsa, serta berkontribusi pada pembangunan sosial yang lebih inklusif di Indonesia.

B. Dinamika Sosial dan Kultural Islam di Indonesia

1. Hubungan antara masyarakat Islam dengan masyarakat non-Islam

Hubungan antara masyarakat Islam dan masyarakat non-Islam di Indonesia merupakan aspek penting yang mencerminkan dinamika sosial dan kultural negara ini. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia memiliki tradisi panjang dalam interaksi antara berbagai kelompok agama. Sejak awal penyebaran Islam di Indonesia pada abad ke-13, interaksi antara umat Islam dan masyarakat non-Islam telah terjadi, di mana proses akulturasi menciptakan suasana saling menghargai¹⁶.

Elemen-elemen budaya lokal sering diintegrasikan dalam praktik keagamaan, seperti dalam perayaan hari besar Islam yang melibatkan unsur-unsur budaya non-Islam. Namun,

¹⁶ Redi Hadiyanto Redi, "Sejarah Kebijakan Moneter Dalam Islam (Fathimiyah, Mamalik, Persia, India, Dan Turki Utsmani)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 1117, <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12256>.

sejarah Indonesia juga mencatat periode ketegangan dan konflik antaragama, seperti kerusuhan di Maluku dan Poso pada awal 2000-an, yang menunjukkan bahwa tantangan dalam membangun hubungan harmonis tetap ada. Di tengah keberagaman, masyarakat Indonesia umumnya menunjukkan sikap toleransi terhadap perbedaan, dengan banyak organisasi keagamaan, baik Islam maupun non-Islam, yang aktif dalam dialog antarumat beragama. Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, misalnya, memainkan peran penting dalam mempromosikan nilai-nilai toleransi dan perdamaian, melalui program-program dialog dan kerjasama dalam kegiatan sosial untuk memperkuat pemahaman dan pengertian antarumat beragama. Meskipun tantangan masih ada, upaya untuk menciptakan harmoni antara masyarakat Islam dan non-Islam terus dilakukan, mencerminkan keinginan bersama untuk hidup berdampingan dalam keberagaman.

2. Perkembangan budaya dan pendidikan Islam.

Perkembangan budaya dan pendidikan Islam di Indonesia telah berlangsung sepanjang sejarah, menunjukkan hubungan yang erat antara nilai-nilai agama dan tradisi lokal. Sejak kedatangan Islam, para ulama dan tokoh agama berperan penting dalam mendidik masyarakat dan menyebarkan pengetahuan. Pendidikan Islam di Indonesia mulai terorganisir dengan berdirinya pesantren, yang menjadi lembaga pendidikan tradisional dan pusat kegiatan keagamaan. Di pesantren, santri tidak hanya diajarkan ilmu agama, tetapi juga pengetahuan umum, sastra, dan kebudayaan lokal, menciptakan generasi yang memiliki kemampuan dalam berbagai bidang¹⁷.

Seiring dengan perkembangan zaman, muncul berbagai bentuk lembaga pendidikan Islam modern, seperti madrasah dan sekolah Islam yang mengintegrasikan kurikulum umum dengan pendidikan agama, mencerminkan upaya untuk menyesuaikan pendidikan dengan tuntutan era global. Dalam konteks budaya, Islam di Indonesia menunjukkan karakteristik yang unik, hasil dari akulturasi antara ajaran agama dan budaya lokal. Banyak elemen budaya, seperti seni, musik, dan sastra, diadaptasi dan diolah dalam bingkai Islam. Misalnya, seni ukir, batik, dan wayang kulit sering kali menyisipkan nilai-nilai Islam dalam karya-karyanya. Selain itu, organisasi-organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah telah berkontribusi besar dalam pengembangan pendidikan dan budaya Islam, baik melalui pendirian lembaga pendidikan, seminar, maupun kegiatan sosial yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Meskipun menghadapi tantangan dari modernisasi dan

¹⁷ Aji Luqman Panji et al., "Pendidikan Islam Dengan Penanaman Nilai Budaya Islami," *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi* 6, no. 1 (2023): 9, <https://doi.org/10.32529/al-ilmi.v6i1.2155>.

globalisasi, perkembangan budaya dan pendidikan Islam di Indonesia tetap berlangsung dinamis, menciptakan kekayaan budaya yang berakar pada ajaran Islam dan tradisi lokal.

3. Pengaruh globalisasi terhadap praktik keagamaan.

Pengaruh globalisasi terhadap praktik keagamaan di Indonesia, khususnya dalam konteks Islam, sangat signifikan dan kompleks. Di era globalisasi, akses terhadap informasi dan komunikasi menjadi semakin mudah, memungkinkan masyarakat untuk terpapar pada beragam pemikiran dan praktik keagamaan dari berbagai belahan dunia¹⁸. Hal ini telah memperkaya pengetahuan umat Islam tentang berbagai pendekatan dalam beragama, mulai dari interpretasi ajaran Islam yang moderat hingga yang lebih konservatif. Di satu sisi, globalisasi mendorong munculnya gerakan-gerakan reformis dalam Islam, di mana banyak individu dan kelompok mencoba untuk memperbarui praktik keagamaan agar sesuai dengan konteks modern dan tantangan zaman.

Misalnya, banyak kalangan yang berupaya untuk memahami ajaran Islam dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan inklusif, serta berusaha mengintegrasikan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan dalam praktik keagamaan sehari-hari. Namun, di sisi lain, globalisasi juga membawa tantangan baru, seperti meningkatnya pengaruh paham-paham radikal yang memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk menyebarkan ideologi ekstremis. Fenomena ini sering kali menyebabkan ketegangan di masyarakat, di mana beberapa kelompok berusaha mempertahankan praktik keagamaan yang lebih tradisional dan menolak modernisasi. Selain itu, globalisasi juga berdampak pada ritual-ritual keagamaan, di mana beberapa praktik mulai diadopsi atau disesuaikan dengan pengaruh budaya asing. Masyarakat yang terpapar oleh arus globalisasi cenderung lebih terbuka terhadap perubahan, namun tetap berusaha menjaga identitas keagamaan mereka. Oleh karena itu, pengaruh globalisasi terhadap praktik keagamaan di Indonesia menciptakan dinamika yang terus berlangsung, dengan masyarakat berusaha menemukan keseimbangan antara tradisi dan modernitas dalam menjalankan keyakinan mereka.

¹⁸ Mubin Syahrul, "Pengaruh Globalisasi Terhadap Identitas Keagamaan Dalam Kalangan Pemuda Muslim," *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 2023 (2020): 1093–1104, <https://kompasiana.com/syahrulmubin/5e4bb2ce097f3666bf04d932/pengaruh-globalisasi-terhadap-identitas-nasional>.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam perjalanan sejarah sosial Islam di Indonesia setelah kemerdekaan, terlihat bahwa dinamika yang terjadi melibatkan interaksi kompleks antara aspek politik, sosial, budaya, dan agama. Selama Orde Lama, masyarakat Islam memainkan peran penting dalam memperjuangkan kemerdekaan dan pembentukan identitas bangsa, meskipun mengalami berbagai tantangan dari kebijakan pemerintah yang sering kali bertentangan dengan aspirasi umat. Pada masa Orde Baru, meskipun terdapat pembatasan ruang gerak bagi organisasi Islam, banyak di antara mereka yang tetap aktif dalam memberikan kontribusi bagi pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 membuka kembali ruang partisipasi bagi masyarakat Islam, di mana organisasi-organisasi keagamaan kembali berperan aktif dalam politik dan sosial, mendorong nilai-nilai toleransi dan kerjasama antarumat beragama.

Namun, pengaruh globalisasi juga membawa tantangan baru, yang mempengaruhi praktik keagamaan dan identitas budaya masyarakat. Dengan demikian, perkembangan sosial dan kultural Islam di Indonesia mencerminkan keberagaman yang kaya, di mana masyarakat berupaya untuk menyeimbangkan antara tradisi, modernitas, dan nilai-nilai universal dalam menghadapi tantangan zaman. Sebagai bagian dari masyarakat yang plural, penting bagi umat Islam di Indonesia untuk terus berkontribusi dalam menciptakan harmoni dan kesejahteraan sosial, serta menjaga keberagaman sebagai kekayaan bangsa.

B. Saran

Dalam menghadapi tantangan dan dinamika yang terus berkembang dalam masyarakat, penting bagi umat Islam di Indonesia untuk terus memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai toleransi, dialog, dan kerjasama antarumat beragama. Organisasi-organisasi Islam, baik yang tradisional maupun modern, sebaiknya berfokus pada pengembangan program-program yang mendorong pemahaman lintas agama dan budaya, sehingga dapat memperkuat kerukunan di tengah keberagaman. Selain itu, pendidikan Islam perlu ditingkatkan dengan mengintegrasikan kurikulum yang relevan dengan konteks global dan lokal, agar generasi muda mampu beradaptasi dan berkontribusi positif dalam masyarakat yang semakin kompleks.

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi juga dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan nilai-nilai Islam yang moderat dan inklusif, sekaligus mengedukasi masyarakat tentang bahaya paham-paham ekstremis yang dapat memecah belah. Terakhir, penting bagi para pemimpin masyarakat dan tokoh agama untuk berperan aktif dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam dialog terbuka mengenai isu-isu sosial, politik, dan keagamaan, demi menciptakan kesatuan dan harmoni di dalam masyarakat. Dengan upaya bersama, diharapkan umat Islam di Indonesia dapat memainkan peran sentral dalam membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Hawari, Alhilar Yusril, Utang Suwaryo, and Dede Sri Kartini. "Perbandingan Peran Nahdlatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyah Dalam Politik Di Indonesia." *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)* 5, no. 1 (2023): 41–53. <https://doi.org/10.18196/jpk.v5i1.19187>.
- Hudayah, N, and R. Winarni. "Pengaruh Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Kehidupan Etnis Tionghoa Di Bidang Politik, Sosial." *Publika Budaya* 2, no. 2 (2014): 19–31.
- Irza Afifi, Rizqi, and Sofyan Kristianwantoni. "Gerwani In The Communist Ideology of 1950-1965." *Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan, Dan Humaniora)* 3, no. 1 (2019): 10–20. <https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet/article/view/690>.
- Jamaluddin, Jamaluddin, Misbahuddin Misbahuddin, and Kurniati Kurniati. "Peran Organisasi Islam Di Indonesia Dalam Pengembangan Dan Penegakan Hukum Islam." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 2 (2022): 130–43. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i2.567>.
- Khoirunni'mah, Aisyah. "Sejarah Dan Peran Muhammadiyah Untuk Kemajuan Indonesia." *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2, no. 4 (2024): 124–34. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i4.442>.
- Mubin Syahrul. "Pengaruh Globalisasi Terhadap Identitas Keagamaan Dalam Kalangan Pemuda Muslim." *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 2023 (2020): 1093–1104. <https://kompasiana.com/syahrulmubin/5e4bb2ce097f3666bf04d932/pengaruh-globalisasi-terhadap-identitas-nasional>.
- Pamungkas, Cahyo, Irin Oktafiani, and Leonardus Imbhiri. "Makna Pembangunan Bagi Orang Asli Papua: Studi Terhadap Marginalisasi Dan Depopulasi Di Tanah Papua." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, no. 2019 (2022): 16–38. <https://doi.org/10.26593/jihi.v0i00.5970.16-38>.
- Panji, Aji Luqman, Achmad Ruslan Afendi, Akhmad Ramli, Sudadi Sudadi, and Agus Mubarak. "Pendidikan Islam Dengan Penanaman Nilai Budaya Islami." *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi* 6, no. 1 (2023): 9. <https://doi.org/10.32529/al-ilmi.v6i1.2155>.
- Prasetyo, Hadi. "Strategi Kritik Cerpen 'Telinga' Terhadap Orba: Meninjau Struktur Produksi Dan Ideologi Teks." *Fon: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia* 17, no. 2 (2021): 122–34. <https://doi.org/10.25134/fon.v17i2.4329>.

- Redi, Redi Hadiyanto. "Sejarah Kebijakan Moneter Dalam Islam (Fathimiyah, Mamalik, Persia, India, Dan Turki Utsmani)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 1117. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12256>.
- Rohman, Saipul, Nurita Singalodra, and Dinar Ayudya Maharani. "Eksplorasi Sejarah Pemikiran Hukum : Integrasi Filsafat Hukum Dan Sosiologi Hukum Pada Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan" 6, no. 4 (2024): 11278–89.
- Safar, Muhammad, and Ismaidar. "Sejarah Perkembangan Politik Hukum Nasional." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3 (2023): 9078–88.
- Sahi, Yayan, Sofyan Jama, Amran Hulubangga, and Alexander Kaaba. "PERGULATAN DOKTRIN POLITIK NAHDLATUL ULAMA: (Refleksi Masa Kolonial Belanda, Jepang, Era Kemerdekaan, Orde Baru Hingga Pasca Reformasi Di Indonesia)." *Jp: Jurnal Polahi* 1, no. 1 (2023): 1–16.
- Sofyan, Sofyan. "Eksistensi Pendidikan Dan Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia Pra Dan Pasca Kemerdekaan." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 16, no. 1 (2022): 344. <https://doi.org/10.35931/aq.v16i1.856>.
- Tentiasih, Septyana. "Peran Muhammadiyah Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Islam Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kramat Jati* 3, no. 2 (2023): 60–69.
- Zidah, Afiani Arofatul, Krisna Ridha Pratama, and Yohanes Purwanto. "Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam Era Reformasi Di Indonesia." *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah* 9, no. 1 (2021): 97. <https://doi.org/10.24127/hj.v9i1.2528>.
- Zulaiha, Eni, Kartini Fujiyanti Agustin, and Nida Al Rahman. "Pengaruh Sosial Politik Pada Metodologi Penafsiran Di Indonesia (Orde Lama, Orde Baru Dan Reformasi)." *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 5, no. 1 (2022): 25–34. <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v5i1.15538>.